|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harian  | : | Sulteng Post | KasubaudSulteng I |
| Hari, tanggal | : | Rabu, 17 Desember 2014 |
| Keterangan | : | Keputusan (SK) Gubernur Sulteng terkait anggaran pelaksanaan Sail Tomini di Kabupaten Parmout tahun 2015 mendatang masih terus menjadi pertanyaan sejumlah pihak |
| Entitas | : | Provinsi |

SULTENG POST – Landasan hukum berupa Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulteng terkait anggaran pelaksanaan Sail Tomini di Kabupaten Parmout tahun 2015 mendatang masih terus menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Misalnya, anggota DPRD Parmout yang menyampaikannya dalam sidang paripurna dengan agenda pandangan fraksi-fraksi, Rabu (17/12).

Salah satu fraksi yang mempertanyakan hal itu yakni, fraksi Amanat Persatuan yang disampaikan melalui juru bicaranya, H Masrin M Said. Ia mengatakan, Banggar diminta bersikap hati-hati, karena struktur anggaran RAPBD Parmout tahun 2015 terdapat alokasi anggaran Sail Tomini yang begitu besar berjumlah miliaran rupiah.

Sementara kata dia, landasan hukum yang mendasari dialokasikannya anggaran Sail Tomini tidak begitu jelas, masih mengambang. Landasan hukum Sail berupa Keppres No. 42 tahun 2014, yang ditandatangani Susilo Bambang Yudhoyono. Sekarang rezim telah berganti dengan Joko Widodo dengan berbagai perubahan nomenklatur dan kewenangan.

Selain itu, dalam Keppres No. 42 tahun 2014 pelaksanaan Sail Tomini dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, puncaknya di Sulteng. Oleh karena itu, fraksi Amanat Persatuan menyatakan sikap, pengalokasian anggaran Sail Tomini pada struktur RAPBD Parmout tahun 2015, harus melalui landasan hukum jelas dan memperoleh kepastian hukum, agar tidak terjebak dengan masalah hukum. “Mengapa kami mengkritisi masalah ini? Karena dewasa ini yang menjadi objek dan fokus pengawasan keuangan antara lain terdiri dari landasan hukum, perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan azas manfaat,” tandasnya.

Akibat hal tersebut tambahnya, ada beberapa catatan dari fraksi Amanat Persatuan. Diantaranya, landasan hukum harus dilengkapi. Keppres Sail Tomini yang sudah ada harus tetap ditindaklanjuti dengan SK Gubernur Sulteng, tentang penunjukan kabupaten Parmout sebagai tempat dilaksanakannya puncak acara Sail Tomini.

Pihaknya juga meminta dilakukan kajian kembali dan analisa azas manfaat kehadiran Sail Tomini tahun 2015 mendatang dan sosialisasikan secara luas kepada seluruh masyarakat.

Dia menuturkan, anggaran APBD Parmout yang dialokasikan tahun 2015, harus tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat miskin. Anggaran yang dialokasikan untuk seluruh program kegiatan harus berbasis kinerja, transparan dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menanggapi hal itu, Sekab Parmout, H. Ekka Pontoh mengatakan, Bupati Parmout telah menerima langsung surat berkop Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menkokesra). Bahkan, setelah menerima surat tersebut pihaknya langsung mensosialisasikannya. “Untuk sementara surat keputusan Kemkokesra, Sulteng dan kabupaten Parmout sebagai penyelenggara Sail Tomini,” aku Ekka.

Selain itu juga kata dia, pihaknya telah menyerahkan surat tersebut kepada DPRD Parmout untuk kebutuhan pembahasan RAPBD tahun 2015 melalui Kepala Bappeda Parmout.

Dalam point pertama surat berkop Menkokesra tersebut bernomor: B.1863/DEP.V/XII/2014, perihal dukungan program dan kegiatan Sail Tomini 2015, tertanggal 16 Desember 2014, disebutkan Sail Tomini tahun 2015 diselenggarakan dengan 19 bidang kegiatan yang puncak acaranya dilaksanakan pada September 2015 di kabupaten Parmout dan provinsi Sulteng. Tetapi, pada point kedua disebutkan bahwa sambil menunggu revisi Keppres No. 42 tahun 2014, sebagai acuan kerja tetap menggunakan keputusan presiden No 42 tahun 2014.OPPIE